

Demberdayaan Perempuan Pedesaan

Pengembangan Metodologis Kajian Perempuan
Prof. Dr. Pudjiwati Sajogyo

Kata Pengantar: Ny. Hj. Vita Gamawan Fauzi, Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat



Editor: Ekawati S. Wahyuni dan Lala M. Kolopaking

Bemberdayaan *Perempuan* **P**edesaan

Pengembangan Metodologis Kajian Perempuan
Prof. Dr. Pudjiwati Sajogyo

Kata Pengantar: Ny. Hj. Vita Gamawan Fauzi, Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat



Editor: Ekawati S. Wahyuni dan Lala M. Kolopaking

Bemberdayaan *Perempuan* **LP**edesaan

Pengembangan Metodologis Kajian Perempuan
Prof. Dr. Pudjiwati Sajogyo

Bemberdayaan **IP**erempuan **P**edesaan

Pengembangan Metodologis Kajian Perempuan
Prof. Dr. Pudjiwati Sajogyo

PENULIS:

Pudjiwati Sajogyo (Alm.)

Aida Vitayala Hubeis

Clara M. Kusharto

Dwi Astuti

Dwi Sadono

Ekawati S. Wahyuni

Henny Windarti

Herien Puspitawati

Julia Indrawati Sari

Keppi Sukesi

Lala M. Kolopaking

Lisna Y. Poeloengan

Maihasni

Melani A. Sunito

Mohammad Iqbal Banna

Murdianto

Siti Amanah

Siti Madaniyah

Siti Sugiah M. Mugniesyah

Titik Sumarti

Tyas Retno Wulan

Ulfa Hidayati

Winati Wigna

EDITOR:

Ekawati Sri Wahyuni

Lala M. Kolopaking

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEDESAAN
Pengembangan Metodologis Kajian Perempuan Prof. Pudjiwati Sajogyo

Penulis:

Aida Vitayala Hubeis - Clara M. Kusharto - Dwi Astuti - Dwi Sadono -
Ekawati S. Wahyuni - Henny Windarti - Herien Puspitawati - Julia Indrawati
Sari - Keppi Sukesni - Lala M. Kolopaking - Lisna Y. Poeloengan - Maihasni -
Melani A. Sunito - Mohammad Iqbal Banna - Murdianto - Pudjiwati Sajogyo
(Alm.) - Siti Amanah - Siti Madaniyah - Siti Sugiah M. Mugniesyah - Titik
Sumarti - Tyas Retno Wulan - Ulfa Hidayati - Winati Wigna

Editor:

Ekawati S. Wahyuni
Lala M. Kolopaking

Layout:

Mohammad Iqbal Banna

Desain Buku dan Kulit Sampul:

Mohammad Iqbal Banna

Diterbitkan pertama kali, Juni 2010
oleh

Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB
Kampus IPB Baranangsiang
Jl. Raya Pajajaran - Bogor
Telp. 0251 - 8345724, e-mail: psp3@ipb.ac.id

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
Isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
ISBN: 978-979-8637-60-5

DAFTAR ISI

Halaman

PENGANTAR

Perempuan Pedesaan: Dari Kajian Peranan Hingga Pemberdayaan
(Ekawati S. Wahyuni, Lala M. Kolopaking)..... 1

A. KAJIAN AWAL MENGENAI KELUARGA DAN PEREMPUAN PEDESAAN DI INDONESIA

BAB 1 Pendekatan dan Identifikasi Instrumen Penelitian Wanita:
Kasus Wanita di Pedesaan (Pudjiwati Sajogyo)..... 19

BAB 2 Pola Bekerja Wanita Pedesaan dalam Pembangunan
(Pudjiwati Sajogyo)..... 35

BAB 3 Penelitian Wanita dan Pembangunan Pedesaan di
Indonesia Periode 1981-1987 (Pudjiwati Sajogyo)..... 73

BAB 4 Kajian Perempuan dan Keluarga Pedesaan: Dari
Disertasi ke Studi Perempuan di Indonesia (Lala M.
Kolopaking, Tyas Retno Wulan, Maihasni, Ekawati S.
Wahyuni)..... 89

BAB 5 Dinamika Hubungan Gender Di Pedesaan Jawa dalam
Tiga Dasawarsa (1978-2008) (Keppi Sukesi)..... 123

B. PERKEMBANGAN KAJIAN PERAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEDESAAN

BAB 6 Pemberdayaan Keluarga Petani Melalui Peningkatan
Akses Perempuan terhadap Skim Kredit Bergulir Usaha
Kulawargi Mandiri (Siti Sugiah M. Mugniesyah, Henny
Windarti, Herien Puspitawati)..... 151

BAB 7 Partisipasi Perempuan untuk Meningkatkan Taraf Hidup
Keluarga (Winati Wigna, Herien Puspitawati)..... 173

BAB 8 Memaknai Internasionalisasi Perempuan Pedesaan (Lala
M. Kolopaking)..... 205

BAB 9 Desain Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan
Indonesia untuk Peningkatan Pembangunan dan
Lingkungan Permukiman Daerah Asal (Lisna
Y.Poeloengan dan M.Iqbal Banna)..... 233

o

zati
ni -
gyo
k

C. KAJIAN APLIKASI KEBIJAKAN BERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, KELUARGA, DAN PEREMPUAN

BAB 10	Pemberantasan Buta Aksara sebagai Cara Pemberdayaan Perempuan (Ekawati S. Wahyuni, Winati Wigna, Murdianto, Dwi Sadono).....	257	Taba 2.7 2.5
BAB 11	Kajian Pelayanan Kesehatan bagi Ibu dan Anak di Pedesaan (Titik Sumarti).....	289	
BAB 12	Situasi Pangan dan Gizi dan Penanggulangannya di Kabupaten Bogor (Clara M. Kusharto, Siti Madaniyah).....	317	
BAB 13	Upaya Pengembangan Mutu Kehidupan Masyarakat Desa Secara Berkelanjutan dan Berperspektif Gender (Siti Amanah).....	349	4.

D. PERAN LSM DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

BAB 14	Perempuan Pedesaan: Liku-liku Meretas Jalan Menuju Keberdayaan (Dwi Astuti).....	381	5.
BAB 15	Pemberdayaan Perempuan Usaha Kecil: Jalan Panjang Menuju Keberdayaan. (Julia Indrawati Sari).....	399	6.
BAB 16	Gerakan Konservasi Perempuan Nyungcung: Hasil Interaksi antara Kemiskinan, Budaya Patriarkhi, dan Pengaruh Ornop (Ulfa Hidayati).....	423	6.

E. POLITIK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

BAB 17	Menambah Rumit? Menyertakan Isu Perempuan dan Gender dalam Gerakan/Ornop Lingkungan Hidup (Melani A. Sunito).....	447	6.
BAB 18	Studi Evaluasi Penyelenggaraan PUG di Daerah (Aida Vitayala S. Hubeis).....	457	6.

6

6

6

6

DAFTAR TABEL

	Tabel	Halaman
'57	2.1 Jumlah Petani Berdasarkan Status Kepemilikan.....	40
89	2.2 Rata-rata Jam Kerja Pria dan Wanita (Sepuluh Tahun Ke Atas) dalam Sehari untuk Pekerjaan Mencari Nafkah di Dua Desa Jawa Barat dan Satu Desa Jawa Tengah, pada tahun 1977-1978 dan 1971-1972.....	55
17	4.1 Kecenderungan Topik dan Sub-topik Tesis dan Disertasi Bertemakan Wanita dan Keluarga, PS SPD – SPS – IPB, 1986-2004.....	91
49	5.1 Jenis Pekerjaan Rokok Mesin dan Rokok Tangan serta Pembagian Kerja Laki-laki dan Perempuan.....	136
81	5.2 Jenis Pekerjaan Pertanian, Pembagian Kerja Berdasar Gender dan Tingkat Upah.....	139
99	6.1 Kondisi Partisipan Skim Kredit Bergulir UKM di Tiga Desa Kasus.....	156
23	6.2 Jenis Usaha yang Dkembangkan Partisipan Skim Kredit UKM di Tiga Desa Kasus (dalam jumlah dan %).....	158
	6.3 Pengambil Keputusan Usaha Produktif Partisipan UKM di Tiga Desa Kasus (%).....	159
	6.4 Pelaku Usaha Produktif Partisipan UKM di Tiga Desa Kasus (%).....	160
17	6.5 Alokasi Kredit UKM dalam Kegiatan Produktif di Tiga Desa Kasus (%).....	161
57	6.6 Perkembangan Jumlah Kredit dan Infak UKM di Tiga Desa Kasus Periode 2001-2003 (dalam Rupiah).....	162
	6.7 Perkembangan Tabungan UKM di Tiga Desa Kasus Menurut Nama Rembug Pusat dan Jenis Tabungan.....	164
	6.8 Frekuensi Penundaan Angsuran Partisipan UKM di Tiga Desa Kasus.....	166
	6.9 Posisi Pinjaman, Pengembalian, Tabungan dan Jumlah Anggota Skim Kredit UKM di Tiga Desa di Tiga Kabupaten di Jawa Barat per 21 November 2003.....	167

6.10	Jumlah Kredit dan Infak UKM di Tiga Desa Kasus Tahun Ke-3.....	168	11
7.1	Indeks Manusia Pembangunan NTB, Tahun 1996 dan 1999.....	179	11
7.2	Persentase Rumahtangga yang Mendapat Bantuan Pangan/Sembako/Kredit pada Januari-Desember 2002 menurut Jenis Bantuan, 2003.....	180	11
7.3	Nama KPK Di Desa Terara dan Desa Bujak Menurut Waktu Pendirian.....	182	1
7.4	Posisi Responden dalam Kepengurusan KPK (n=55) di Desa Penelitian di NTB, 2003.....	184	1
7.5	Jenis Kegiatan Usaha dan Bentuk Usaha Individu.....	185	
7.6	Komposisi Responden KPK Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, NTB 2003.....	187	
7.7	Laporan Keuangan dan Statistik (LKS) LKM Teratai, Desa Terara, Kecamatan Terara, NTB, 2003.....	190	
7.8	Motivasi yang Mendorong Perempuan Menjadi Anggota KPK.....	195	
8.1	Peta Permasalahan dan Kreasi BMP Mengatasinya di Arab Saudi.....	214	
8.2	Peta Permasalahan dan Kreasi BMP Mengatasinya di Hong Kong.....	219	
9.1	Jenis Data, Metode Pengumpulan dan Sumber Data.....	238	
9.2	Analisis Kebutuhan Stakeholders pada Dimensi Kebijakan Publik.....	240	
9.3	Perbedaan Berbagai Aspek Kehidupan Rumahtangga Antara Sebelum dan Sesudah Menjadi BMP.....	244	
10.1	Jumlah dan Persentase Buta Aksara ¹ di Indonesia Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 1990 dan 2003.....	266	
10.2	Jumlah dan Persentase Penduduk Buta Aksara Usia 10 - 44 Tahun di Empat Provinsi Penelitian, 2003.....	267	
10.3	Profil Perempuan Buta Aksara di Empat Propinsi.....	268	
10.4	Pentingnya Kemampuan Baca Tulis dan Pengetahuan PLS di Empat Provinsi.....	269	
10.5	Latar Belakang Keluarga Responden dan Alasan Tidak		

	Sekolah di Empat Provinsi.....	270
11.1	Kualitas Hidup Manusia dan Kualitas Hidup Perempuan Indonesia Berdasarkan IPM dan IPG Tahun 2004.....	291
11.2	Alternatif Daerah sebagai Lokasi Kegiatan.....	294
11.3	AKI di Kabupaten Bandung (Jawa Barat), Kabupaten Bantul (D.I. Yogyakarta) dan Kabupaten Solok (Sumatera Barat) pada Tahun 2000 – 2004.....	294
11.4	AKB di Kabupaten Bandung (Jawa Barat), Kabupaten Bantul (D.I. Yogyakarta) dan Kabupaten Solok (Sumatera Barat) pada Tahun 2001 – 2003.....	295
11.5	Umur Harapan Hidup (eo) di Kabupaten Bandung (Jawa Barat), Kabupaten Bantul (D.I. Yogyakarta) dan Kabupaten Solok (Sumatera Barat) pada Tahun 2003 – 2004.....	296
11.6	Evaluasi Kegiatan Puskesmas Cakupan Program Puskesmas Soreang Tahun 2003.....	297
11.7	Jumlah dan Persentase Responden Pengguna Puskesmas Menurut Tingkat Kemiskinan dan Kabupaten Tahun 2005	302
11.8	Jumlah dan Persentase Responden Pengguna Puskesmas Menurut Status Asuransi Kesehatan dan Kabupaten tahun 2005.....	303
11.9	Jumlah dan Persentase Responden Pengguna Puskesmas Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten tahun 2005.....	304
11.10	Jumlah dan Persentase Responden Menurut Fasilitas Kesehatan yang Paling Sering Digunakan dan Kabupaten tahun 2005.....	305
11.11	Jumlah dan Persentase Responden Menurut Lokasi Fasilitas Kesehatan dan Kabupaten Tahun 2005.....	306
11.12	Jumlah dan Persentase Responden Menurut Penerima Bantuan Program Pelayanan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Kabupaten Tahun 2005.....	310
11.13	Jumlah dan Persentase Responden menurut Tindakan yang dilakukan dalam kondisi darurat dan Kabupaten Tahun 2005.....	311
12.1	Peringkat kualitas SDM diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (HDI).....	319

12.2	Beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia (Sejak Tahun 1907).....	322
12.3	Dampak Kekurangan Zat Gizi pada Masa Hamil Hingga Lanjut Usia.....	324
12.4	Tanda Dan Gejala Kurang Energi Protein.....	326
12.5	Prevalensi Anemia Gizi Besi Anak Balita Berdasarkan SKRT 2001.....	328
12.6	Prevalensi Anemia Gizi Besi Tahun 2001 pada Wanita Usia Subur (WUS).....	329
12.7	Prevalensi Kegemukan pada Anak dari Berbagai Penelitian di Indonesia.....	332
12.8	Hasil Kegiatan PMT-P di Kabupaten Bogor Tahun 2007.....	342
12.9	Hasil Penanganan Gizi Buruk Di Klinik Gizi di Kabupaten Bogor Tahun 2007.....	344
13.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia menurut Daerah, 1996-2005.....	355
13.2	Kekhasan Kelembagaan Desa di Masing-masing Lokasi Studi.....	358
13.3	Data yang Digunakan dalam Studi.....	359
13.4	Keadilan dan Kesetaraan Gender pada Beberapa Segi Kehidupan.....	370
13.5	Sistem Sosial Masyarakat Desa Kajian di Lima Provinsi.....	371
13.6	Indeks HDI, GDI dan GEM pada Lima Provinsi.....	375
18.1	Kebijakan Pembangunan Daerah Responsif Gender, 2006	478
18.2	Persentase Efisiensi Pelaksanaan PUG Daerah, 2006.....	492

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
4.1	Jejaring Konsep Dominan Studi Perempuan dan Keluarga.....	97
8.1	Bagan Alir Kajian.....	210
8.2	Pemahaman BMP sebagai Bagian dari Sistem Bekerja ke Luar Negeri.....	224
9.1	Alur Kerja Penelitian.....	237
9.2	Diagram Sistem Pemberdayaan BMP Dalam Rangka Perbaikan Kualitas SDA dan Permukiman di Daerah Asal.....	241
9.3	Bagan Desain Kelembagaan.....	250
12.1	Aspek Kehidupan dalam IPM.....	319
12.2	Permasalahan Gizi di Indonesia.....	320
12.3	Dampak Kekurangan Zat Gizi pada Masa Janin dan Anak Umur 0-3 Tahun.....	323
12.4	Berbagai Penyebab Terjadinya Gizi Buruk.....	325
12.5	Pertumbuhan Anak Indonesia.....	326
12.6	Peta Sebaran Defisiensi Vitamin A Negara-negara di Dunia Tahun 2004.....	327
12.7	Lama Melihat pada Bayi Sehat dan Kurang Fe.....	329
12.8	Umur Mulai Merangkak pada Bayi Sehat dan Kekurangan Fe.....	330
12.9	Hasil bulan penimbangan balita pada tahun 2007.....	334
12.10	Status Gizi Balita Di Kabupaten Bogor Tahun 2007.....	335
12.11	Temuan Baru Kasus Gizi Buruk Tingkat Berat Tahun 2007.....	336
12.12	Prevalensi Anemia dan KEK Ibu Hamil di Kabupaten Bogor.....	336
12.13	Cakupan Program Gizi (SKDiN) Tahun 2007.....	337
12.14	Cakupan Distribusi Fe1 Dan Fe3 Tahun 2007.....	337
12.15	Cakupan Distribusi Fe pada Ibu Nifas tahun 2007.....	338

12.16	Cakupan Vitamin A Tahun 2007.....	339
12.17	Hasil Pemantauan Konsumsi Garam Beriodium Tingkat Masyarakat Pada Bulan Februari 2007.....	339
13.1	Upaya Peningkatan Mutu Kehidupan Masyarakat Desa...	376
18.1	Komitmen Kelembagaan PP dalam PUG 2006.....	477
18.2	Total APBD dan Total Dana Responsif Gender di Daerah	481
18.3	Komitmen Kebijakan Daerah Dalam Implementasi PUG, 2006.....	483
18.4	Forum Pendukung Implementasi PUG, PP dan PA di Lokasi Studi.....	485
18.5	Pelaksanaan Pemampuan PUG di Lokasi Studi, 2006.....	490
18.6	Ketersediaan Data Terpilah Gender di Lokasi Studi, 2006.....	491
18.7	Hasil Skoring <i>Success Story</i>	492
18.8	Efisiensi penyelenggaraan PUG di daerah, 2006.....	493

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Jumlah Jam Kerja Rata-rata dalam Sehari untuk Pria dan Wanita dalam Berbagai Pekerjaan di Bidang Pertanian dan Non-pertanian di Kedua Desa Penelitian Daerah Sukabumi dan Sumedang Jawa Barat (1977-1978).....	69
2	Imbalan Kerja oleh Pekerja Wanita dan Pria pada Pekerjaan Buruh Tani, Buruh dan Jasa per Jam (Rp/jam) Selama Setahun (1977-1978) Menurut Lapisan di Daerah Sukabumi dan Sumedang, Jawa Barat.....	70
3	Imbalan Kerja Rumahtangga (Rp/jam) (kg.beras/jam) (% waktu yang digunakan) dari Beragam Kegiatan Mencari Nafkah Pada Berbagai Lapisan,di Desa A (Sukabumi) dan Desa B (Sumedang), Jawa Barat, 1977-1978.....	71
4	Ragam Usaha Mencari Nafkah Menurut Alokasi (%) jam Kerja dan Tingkat Imbalan Kerja (Rp/jam) di Desa A (Sukabumi) dan Desa B (Sumedang) Jawa Barat 1977—1978.....	72
5	Rata-rata Jam Kerja dalam Sehari: Pria dan Wanita dalam Pekerjaan Rumahtangga dan Pekerjaan Nafkah di Lima Provinsi, 1981 – 1982.....	73
6	Pemberdayaan Keluarga Petani melalui Skim UKM.....	173
7	TERJEMAHAN SURAT AL-BAQARAH 282.....	174

- BAB 13 -

UPAYA PENGEMBANGAN MUTU KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA SECARA BERKELANJUTAN DAN BERPERSPEKTIF GENDER¹

Siti Amanah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ketersediaan SDA saat ini di Indonesia semakin terbatas dan langka. Pemanfaatan SDA yang hanya mengejar produksi, menegasikan kelestarian, aspek sosial, dan belum menerapkan teknologi yang ramah lingkungan telah berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Indonesia dengan luas wilayah lebih kurang 1.890.754 km², tidak diragukan lagi, memiliki potensi SDA dan lingkungan yang berlimpah. Seyogyanya, melalui pengelolaan potensi sumberdaya yang dimiliki, didukung peran pemerintah untuk melayani, mengatur, dan memberdayakan masyarakat, maka mutu kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.

Perkembangan kehidupan masyarakat desa setelah 63 tahun Indonesia merdeka, belum menunjukkan kondisi sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yakni "Kehidupan bangsa yang terlindungi, sejahtera, cerdas, tertib, damai, adil, dan beradab." Salah satu penyebab hal ini adalah penerapan pola pembangunan yang terlalu berorientasi hasil dan mengedepankan pertumbuhan

¹ Merupakan bagian dari Studi Aksi Tata Kelola Pemerintahan Desa Berbasis Kemitraan yang dilakukan penulis bersama Tim Peneliti Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, LPPM IPB, tahun 2006.

(*growth*) dan ukuran berupa angka-angka untuk menunjukkan adanya kemajuan.

Pembangunan belum betul-betul mengacu pada kebutuhan masyarakat desa. Ada gejala masyarakat desa semakin termarginalkan di wilayahnya sendiri. Dengan kata lain, strategi pembangunan yang didasarkan kepada doktrin pertumbuhan *leading-sectors* telah membuat hancur banyak industri kecil di pedesaan. Masyarakat desa termarginalkan dari sistem produksi dan proses pemanfaatan hasil-hasil produksi (aneka-ragam.blogspot.com, Maret 2007). Masyarakat desa paling rentan atas dampak kebijakan dan program pembangunan yang bias dan tidak berpusat pada manusia. Desa memiliki potensi SDA tinggi dan selama ini menjadi sentra produksi baik sektor pertanian dalam arti luas mau pun pertambangan. Di sisi lain, sebagaimana diungkap oleh Kasryno dan Suryana dalam Sitorus dkk. (1996), alam dan tenaga kerja merupakan potensi sekaligus kendala dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Permasalahannya adalah terdapat gejala stagnasi bahkan penurunan kondisi sosio-ekonomi keluarga dan masyarakat di pedesaan dan kerusakan lingkungan yang semakin parah. Entitas masyarakat desa yakni keguyuban dan kegotongroyongan semakin menipis sejalan dengan pergeseran gaya hidup masyarakat. Hal ini senada temuan yang dikemukakan oleh Breman dan Wiradi (2004) bahwa ada perubahan gaya hidup terutama pada kelas menengah dari ekonomi pedesaan ke ekonomi perkotaan dan bahwa perubahan kebijakan politik di Indonesia belum memberikan perubahan positif yang berarti bagi kehidupan masyarakat di desa.

Di tingkat internasional, dalam KTT Milenium PBB pada September 2000 di New York berupaya memetakan berbagai permasalahan kehidupan, antara lain: (1) Setiap tahun, lebih dari 18 juta orang meninggal dunia akibat hal-hal yang berhubungan dengan kemiskinan, umumnya mereka adalah kaum perempuan dan anak-anak; (2) 600 juta anak hidup dalam kemiskinan absolut; (3) 800 juta orang tertidur dalam kondisi lapar setiap harinya; dan (4) Hampir separuh dari penduduk dunia hidup kurang dari dua dolar per hari (kurang dari Rp. 20.000), bahkan lebih dari satu miliar

penduduk dunia hidup dengan satu dolar (Rp. 10.000) per hari; dan (5) Setiap tahun, hampir 11 juta anak meninggal dunia sebelum mencapai usia balita. Atas dasar itu, seluruh negara anggota PBB, termasuk Indonesia, menyepakati untuk bertindak melakukan program pembangunan untuk mengatasi persoalan di atas. Hal ini tertuang dalam komitmen MDGs meliputi: (1) Penghapusan kemiskinan (*eradicate extreme poverty and hunger*); (2) Pendidikan untuk semua (*achieve universal primary education*); (3) Meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan (*promote gender equality and empower women*); (4) Perlawanan terhadap penyakit HIV/AIDS, malaria, dan lainnya (*combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases*); (5) Menurunkan angka kematian anak (*reduce child mortality*); (6) Peningkatan kesehatan ibu (*improve maternal health*); (7) Pelestarian lingkungan hidup (*ensure environmental sustainability*) dan (8) Pengembangan kemitraan global untuk pembangunan (*develop a global partnership for development*).

Kedelapan kriteria MDGs di atas seyogyanya harus dapat diwujudkan hingga di tingkat desa. Akan tetapi, hingga kini mutu kehidupan rakyat di tingkat akar rumput di Indonesia masih memprihatinkan. Faktanya, masih ditemui kondisi gizi buruk pada balita (sekitar 5,1 juta anak di Indonesia yang menderita gizi buruk), ibu hamil kurang gizi, AKI saat melahirkan masih tinggi yakni, berkisar antara 300 dan 400 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan AKI di negara maju hanya sekitar 10 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi baru lahir di Indonesia 20 per 1.000 kelahiran, dan angka kematian bayi berumur kurang dari satu tahun adalah 35 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini memperlihatkan masih buruknya tingkat kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Di sisi lain, terdapat 15 juta penduduk Indonesia yang buta aksara, sulit mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan peluang ekonomi, serta sulit memperoleh energi listrik dan bahan bakar minyak.

Selain persoalan rendahnya mutu kehidupan, orientasi kebijakan pemerintah masih bias gender, bias kepentingan, dan golongan. Belum diterapkannya prinsip pengarusutamaan gender dalam penyusunan kebijakan dan implementasi program pembangunan

merupakan salah satu penyebab inefisiensi proses pembangunan di desa. Kesenjangan gender di pedesaan tampak pada beban ganda yang dipikul oleh perempuan, ketimpangan dalam akses dan kontrol atas SDA, informasi dan teknologi. Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk mendorong kaum perempuan meninggalkan peran reproduktif, namun perlu dikembangkan relasi gender yang bijak, sehingga dapat memberi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk pengembangan diri.

Berkaitan dengan pernyataan di atas, dalam ekofeminisme, sebagai sebuah istilah yang pertama kali dikenalkan oleh Francois d'Eaubonne (1974), perempuan dan alam memiliki hubungan dan manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan alam semesta. Pandangan *ecofeminism* mencoba memperjuangkan kaum perempuan yang tertindas sebagai dampak ketidakadilan yang dialami perempuan dalam interaksinya dengan alam. Dalam perkembangannya dikenal pula sebutan spiritualisme ekofeminisme yang berupaya merefleksikan alam, manusia dan tuhan. Nilai-nilai spiritualisme ketuhanan diadopsi dalam relasi manusia dengan alam. Ekofeminisme menentang bahwa nilai-nilai yang serba kuat selalu diasosiasikan dengan laki-laki dan dicitrakan pada tuhan, sedangkan sifat-sifat pengasih penyayang yang selama ini diasosiasikan pada perempuan, pun dimiliki tuhan. Sehingga, kaum perempuan sebenarnya mampu mengelola alam secara lebih baik dibanding laki-laki. Oleh karenanya gerakan *ecofeminism* sangat menentang adanya dominasi oleh pihak lain, sebagaimana definisi berikut:

"Ecofeminism is the social movement that regards the oppression of women and nature as interconnected. It is one of the few movements and analyses that actually connects two movements. More recently, ecofeminist theorists have extended their analyses to consider the interconnections between sexism, the domination of nature (including animals), and also racism and social inequalities. Consequently it is now better understood as a movement

working against the interconnected oppressions of gender, race, class and nature.”²

Terlepas dari beberapa kelemahan yang ada dalam perspektif ekofeminis, pada kenyataannya dampak negatif pembangunan yang menegasikan dimensi keberlanjutan berdampak pada menurunnya mutu kehidupan dan kerusakan lingkungan. Tak pelak, bencana alam terjadi di berbagai tempat di Indonesia, meningkatnya urbanisasi, terjadinya de-humanisasi di pedesaan yang dicirikan semakin banyaknya petani menjadi buruh atau pekerja di lahan yang dulu miliknya, tidak terjaminnya kesehatan anak, balita, ibu hamil dan menyusui, masih tingginya angka kematian ibu, kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat dan dipicu oleh berbagai sebab serta menurunnya *trust* di antara anggota masyarakat. Atas dasar itulah maka tulisan ini berusaha menjelaskan kehidupan masyarakat desa di lima provinsi berbeda. Penelitian kaji tindak ini dilakukan pada tahun 2006 pada sepuluh desa di Provinsi NAD, Sumatera Barat, Jawa Barat, Bali dan Papua. Kecuali Provinsi Jawa Barat, keseluruhan provinsi memiliki keunikan pada karakteristik desa, yakni memiliki dikotomi tipe desa yaitu desa (yang dibentuk pemerintah) dan desa adat (tumbuh dari keinginan masyarakat sejak dulu guna membantu warga melaksanakan tuntutan adat dan budaya setempat). Masing-masing kelembagaan tersebut memiliki fungsi dan peran tersendiri, dan setiap daerah memiliki sebutan yang berbeda bagi desa yang dibentuk pemerintah dan desa adat. Perwujudan mutu kehidupan masyarakat desa secara berkelanjutan dan berperspektif gender tidak dapat dilakukan secara instan, apalagi dengan pendekatan *top-down*. Untuk itulah, studi kaji tindak ini memiliki kekhasan, yakni mengutamakan pendekatan partisipatif, mendahulukan proses daripada hasil, *output* yang jelas dan terukur, dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Tulisan disusun dengan sistematika sebagai berikut, bagian pertama berupa pendahuluan, berisikan latar belakang, masalah, dan tujuan penulisan. Bagian kedua menyajikan metode penelitian, bagian

² (www.lancs.ac.uk/staff/twine/ecofem/whatisecofeminism.html).

ketiga menguraikan hasil dan pembahasan, dan bagian keempat adalah kesimpulan.

MASALAH DAN TUJUAN PENULISAN

Paradigma pembangunan yang konvensional yakni berorientasi pada produksi dan pertumbuhan tidak berhasil mewujudkan kesejahteraan yang diharapkan. Pembangunan yang hanya mengejar produksi mau pun pertumbuhan terlalu fokus pada hasil-hasil fisik seperti jalan raya, sarana dan prasarana fisik lainnya. Di sisi lain, aspek keberlanjutan, upaya transformasi sikap mental birokrat dan masyarakat, tersedianya layanan publik yang bermutu meliputi akses pendidikan, kesehatan, dan penguatan struktur perekonomian rakyat terabaikan. Implementasi UU Nomor 22/1999 dan UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan mampu sebagai pendorong transformasi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia pada 1996-2005 tampak bahwa kondisi penduduk di desa masih memprihatinkan. Tampak bahwa persentase penduduk miskin di desa senantiasa lebih besar dari tahun ke tahun daripada di kota (Tabel 13.1). Meskipun terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin, namun masih ada 31.775 desa tertinggal dari 70.611 desa yang ada (45%). Ketertinggalan tersebut tidak terlepas dari aspek struktural dan kultural yang menjadi penghalang bagi mobilitas vertikal masyarakat kecil, kerusakan SDA, kemiskinan, dan minimnya akses akan layanan publik.

Gerakan revolusi hijau di tahun 60-an memiliki dampak tertentu bagi kehidupan sosio-ekonomi masyarakat, seperti dikemukakan oleh Pretty (1995). Sisi positifnya adalah keberhasilan mengejar target produktivitas beras. Sisi negatifnya, hingga saat ini gerakan tersebut berpengaruh terhadap struktur sosio-ekonomi dan kondisi SDA dan lingkungan. Hal ini merupakan implikasi akan adanya fakta bahwa revolusi hijau ternyata diterapkan secara intensif sekali di pedesaan, meliputi (1) Pengolahan lahan pertanian; (2) Pengaturan irigasi; (3) Pemupukan; (4) Pemberantasan hama dan penyakit dan (5)

Penggunaan bibit unggul. Penggunaan bibit unggul berdampak pada peningkatan penggunaan pupuk dan zat kimia lainnya. Kemudian teknologi pertanian pun semakin masif digunakan dan menggantikan peran wanita tani dalam produksi pertanian. Kerusakan tanah dan air meluas, dan pengangguran merebak di pedesaan. Mestinya, penerapan teknologi pertanian di pedesaan harus selektif dan didasarkan pada kebutuhan masyarakat setempat, pun disertai pertimbangan relasi gender, pertimbangan kelestarian lingkungan, dan aspek sosio-budaya, dan ekonomi masyarakat.

Tabel 13.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia menurut Daerah, 1996-2005

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
1996	9,42	24,59	34,01	13,39	19,78	17,47
1998	17,60	31,90	49,50	21,92	25,72	24,23
1999	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43
2000	12,30	26,40	38,70	14,60	22,38	19,14
2001	8,60	29,30	37,90	9,76	24,84	18,41
2002	13,30	25,10	38,40	14,46	21,10	18,20
2003	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,37	19,51	15,97

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 47/IX/1 September 2006

Kaum perempuan semakin tersisihkan dalam aktivitas di pedesaan dan jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting di

desa. Sebagai contoh, di beberapa wilayah pedalaman Papua, kaum perempuan bertanggung jawab terhadap penyediaan kayu bakar, pangan, dan air minum. Di sisi lain, kaum perempuan belum terwakili aspirasinya ketika ada program energi dan pangan. Salah satu kelemahan pendekatan pembangunan yang bias gender tersebut adalah tidak dilakukannya analisis gender terlebih dahulu untuk menyusun program pembangunan. Sebagai akibatnya pembangunan yang dilaksanakan tidak menjawab kebutuhan seluruh warga, dan umumnya kaum perempuan dan anak yang terpinggirkan dalam proses tersebut.

Konferensi Tingkat Dunia ke-IV tentang Perempuan yang bertema Persamaan, Pembangunan, dan Perdamaian yang diselenggarakan di Beijing pada tanggal 4 - 15 September 1995, menghasilkan Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi (*Beijing Declaration and Platform for Action*). Deklarasi ditandatangani 189 negara anggota PBB termasuk Indonesia, sebagai upaya mewujudkan persamaan harkat dan martabat kaum perempuan dan meningkatkan akses dan kontrol kaum perempuan atas sumberdaya ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dua belas bidang kritis yang harus menjadi prioritas agar implementasi Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi tersebut dapat dilakukan. Kedua belas bidang kritis tersebut adalah: (1) Perempuan dan kemiskinan; (2) Pendidikan dan pelatihan bagi perempuan; (3) Perempuan dan kesehatan; (4) Kekerasan terhadap perempuan; (5) Perempuan dan konflik bersenjata; (6) Perempuan dan ekonomi; (7) Perempuan dalam kedudukan pemegang kekuasaan dan pengambilan keputusan; (8) Mekanisme-mekanisme institusional untuk kemajuan perempuan; (9) Hak-hak azasi perempuan; (10) Perempuan dan media massa; (11) Perempuan dan lingkungan dan (12) Anak-anak perempuan. Kedua belas bidang kritis tersebut mestinya perlu menjadi prioritas dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat di desa secara berkelanjutan. Mutu kehidupan yang berkelanjutan dilihat dari sisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan akses teknologi.

Pembangunan berkaitan dengan aktivitas mengelola sumberdaya yang dimiliki adalah sebuah proses, bukan sebuah kondisi, proses

tersebut menyangkut nilai-nilai luhur dan nilai-nilai luhur tersebut berkaitan dengan masyarakat yang dicakup dalam pembangunan. Kesejahteraan menurut Hagen *dalam* Misra (1981) berarti *“to get more and better life-sustaining goods for all; respect for others and self esteem; freedom from tyranny of any kind; community life which gives a sense of belonging”*. Memperhatikan kegagalan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan semata, maka kajian aksi ini merupakan salah satu upaya revitalisasi kemampuan masyarakat desa untuk mewujudkan mutu kehidupan yang lebih baik. Adapun tujuan kajian aksi ini adalah untuk:

1. Menjelaskan relasi gender dalam pengelolaan SDA dan lingkungan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan mutu kehidupan masyarakat desa.
2. Turut meningkatkan pemahaman dan kepedulian pemerintah desa akan perspektif gender dalam pengembangan mutu kehidupan secara berkelanjutan.
3. Tergalinya potensi desa dan kemampuan masyarakat desa setempat untuk menjalankan usaha ekonomi produktif berbasis potensi sumber daya lokal sebagai salah satu sumber pendapatan rumahtangga (*coping strategy*).

METODOLOGI

Pendekatan Kajian Aksi

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk membantu menjawab masalah penelitian. Sesuai ciri penelitian dengan pendekatan kajian aksi, data dapat dianalisis di lapangan bersama-sama masyarakat. Penelitian aksi sebagaimana dikemukakan oleh Bawden *dalam* Zuber-Skerritt (1991) adalah mengkombinasikan teori dan praktek menjadi suatu proses yang penting. Penelitian dilakukan melalui empat tahap yang berulang yakni: (1) Penelusuran data sekunder; (2) Penelusuran data primer; (3) Analisis data di lapangan dan antar peneliti dan (4) Klarifikasi atau tahap konfirmatori. Langkah-langkah kaji tindak ini meliputi tujuh tahap yaitu: (i) Pengenalan peneliti

kepada sistem sosial masyarakat (*entry to community*); (ii) Identifikasi masalah dan ditindaklanjuti dengan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan informan kunci; (iii) Lokakarya di tingkat desa dilakukan untuk mendiskusikan langkah-langkah transformasi (*situation improvement*) bersama masyarakat desa, dilanjutkan pelatihan dengan metode partisipatif; (iv) Pendampingan oleh fasilitator; (v) Lokakarya di desa untuk memonitor perubahan; (vi) *Workshop* di kabupaten sebagai proses triangulasi antar pihak; dan (vii) Tindak lanjut studi.

Tabel 13.2. Kekhasan Kelembagaan Desa di Masing-masing Lokasi Studi

No	Kabupaten -Provinsi	Desa Studi	Sebutan Lembaga Adat	Aspek Kewenangan
1	Aceh Besar -NAD	Babah Jurong dan Cot Geundreud	Gampong	Hubungan dengan aktivitas keagamaan dan masyarakat
2	Solok - Sumatera Barat	Nagari Panningahan dan Simanau	Nagari	Sejalan dengan hak asal usul Nagari, tugas dan pembantuan dari pemerintah
3	Ciamis - Jawa Barat	Nasol dan Gunung Sari	-	Serupa dengan desa formal menurut UU 32/2004, yakni aspek administrasi dan kependudukan
4	Tabanan - Bali	Samsam dan Salenbawak	Pakraman	Terkait hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan alam, dan dengan Tuhan (<i>Tri Hita Karana</i>)
5	Jayapura - Papua	Sabron Sari dan Tabla Supa	Kampung	Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam khususnya tanah dan ritual suku

LOKASI KAJIAN

Studi dilakukan selama tujuh bulan, mulai Maret sampai dengan September 2006 pada lima provinsi yang memiliki kelembagaan desa formal dan adanya mekanisme pengaturan masyarakat desa yang dikelola oleh lembaga adat. Pada setiap lokasi studi dipilih dua desa secara sengaja untuk menggambarkan ciri spasial, geografis-ekologis, sosiopolitis, keterisolasian, ekonomi, karakter komunitas, dan karakteristik budaya.

Desa lokasi studi memiliki pengertian desa yang dimaksud pada Bab 1 pasal 1 PP Nomor 72/2005 yakni: "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Selain itu, pada setiap desa studi terdapat peran nilai-nilai lokal berupa adat istiadat yang kuat dengan kewenangan khusus terhadap warganya.

JENIS DAN SUMBER DATA

Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Mutu kehidupan masyarakat desa dilihat dari tiga dimensi yaitu aspek sosio-ekonomi, kelestarian SDA dan teknologi yang berkembang di lokalita. Untuk menganalisis relasi gender digunakan kerangka analisis Mosser. Secara garis besar data-data beserta teknik pengumpulannya disajikan pada Tabel 13.3.

Tabel 13.3. Data yang Digunakan dalam Studi

No	Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Kondisi sosio-ekonomi masyarakat desa.	Sumber primer: Wakil masyarakat	• Wawancara

No	Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
2	Peran pemerintah desa dalam menjamin mutu kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.	desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, aktivis perempuan, PKK, kader posyandu, pendamping. Sumber sekunder: Dokumentasi di desa dan kabupaten, BPS.	semi terstruktur. <ul style="list-style-type: none"> • Diskusi kelompok terfokus. • Observasi berpartisipasi. • Penelusuran data sekunder.
3	Kesetaraan gender dalam pemerintahan desa <u>Akses</u> <ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan menyalurkan aspirasi dalam pembangunan desa • Kemudahan memperoleh informasi dan layanan publik dari pemerintahan desa • Pengambilan keputusan <u>Peran</u> <ul style="list-style-type: none"> • Cakupan bidang keahlian • Kendala dan solusi <u>Manfaat</u> <ul style="list-style-type: none"> • Fisik dan non fisik <u>Kontrol</u> <ul style="list-style-type: none"> • Kesempatan mengontrol Tindak lanjut atas pengawasan dan evaluasi (MONEV).	Sumber primer: Perangkat desa, tokoh perempuan di desa wakil masyarakat desa Sumber sekunder: Informasi atau laporan tentang implementasi pengarusutamaan gender pada Bagian Pemberdayaan Perempuan di masing-masing lokasi	

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian dibagi menjadi tiga bagian. Sub bab pertama menyajikan gambaran umum masyarakat desa di lokasi kajian, sub bab kedua berupa analisis proses kajian aksi, dan bab ketiga menjelaskan upaya pengembangan mutu kehidupan secara berkelanjutan dan berperspektif gender.

Gambaran Desa Kajian dan Relasi Gender dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan

Dari kelima provinsi kajian aksi, jika digambarkan dalam sebuah garis kontinum, tampak bahwa desa kajian di Provinsi Papua dan NAD merupakan lokasi desa yang paling tersendat perkembangannya dari sisi pendidikan, kesehatan, dan perekonomian lokal. Masyarakat desa di lokasi kajian di Provinsi Jawa Barat, Bali, dan Sumatera Barat memperlihatkan ciri masyarakat desa yang sudah jauh berkembang. Hal ini tidak terlepas dari kekondusifan situasi dan kondisi politik, keamanan, kondisi lingkungan fisik, dan "geliat perekonomian" desa di tiga wilayah tersebut.

Provinsi NAD (Desa Kajian: Desa Babah Jurong dan Desa Cot Geundreut, Kabupaten Aceh Jaya). Desa ini tidak terkena bencana alam tsunami, namun struktur nafkah masyarakat desa memperlihatkan adanya keterpurukan dengan diindikasikan oleh masalah belum terpenuhinya kebutuhan dasar. Masyarakat di dua desa saat ini tengah bangkit kembali setelah konflik berkepanjangan yang membuat masyarakat trauma. Upaya penguatan modal sosial baik berupa gotong royong, pengembangan interaksi antar komponen masyarakat dan pengembangan usaha secara berkelanjutan terus digalakkan untuk pemulihan kondisi masyarakat pasca konflik. Pekerjaan utama masyarakat di dua desa setempat adalah di bidang pertanian, jasa dan kerajinan atap rumbia. Kaum

perempuan melakukan usaha kerajinan kopiah Aceh dengan dukungan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).

Dari sisi penyelenggaraan pemerintahan desa yang berperspektif gender, baik Desa Babah Jurong dan Desa Cot Geundreut belum memperlihatkan sistem pemerintahan yang responsif gender. Hal ini tampak pada struktur pemerintahan desa yang belum menunjukkan adanya keterwakilan perempuan. Nuansa kesenjangan gender terlihat pada pengambilan keputusan dalam pemerintahan atau program-program pembangunan belum memperhatikan kebutuhan gender secara keseluruhan.

Provinsi Sumbar (Desa Kajian: *Nagari Simanau Nagari* Panninggahan, Kabupaten Solok). Di provinsi ini ada sebutan *nagari*. Ordonansi nagari pada zaman Belanda mengakui hukum adat/masyarakat hukum adat yang otonom (Alfitri, 2006; Nurrochmat, 2006). Di era desentralisasi pemerintahan, dengan adanya gerakan untuk kembali kekhasan daerah masing-masing, peran *nagari* kembali menguat. Baik *Nagari Simanau* maupun Panninggahan memiliki struktur organisasi pemerintahan desa layaknya pemerintahan desa formal yakni dipimpin oleh seorang wali *nagari* selaku kepala *nagari*, dan didampingi oleh sekretaris *nagari* dan tiga orang Kasi. Sebagai badan legislatif terdapat ketua BPN dan sekretaris BPN. BPN terdiri atas KAN, alim ulama, bundo kanduang, pemuda, dan wakil jorong.

Masyarakat di *Nagari Simanau* hidup dari hasil perkebunan dan pertanian dengan komoditas kopi, karet, dan kayu manis. Sumber energi listrik di *Nagari Simanau* ini disuplai oleh PLTMH dengan kapasitas 25.000 watt dan sudah ditingkatkan menjadi 30.000 watt, layanan PLN belum menjangkau wilayah ini. Biaya pengadaan mesin pembangkit listrik ini mencapai Rp. 240 juta, bantuan Pemerintah Jepang pada tahun 1996 (Amanah, 2006.; Amanah, 2007; Nurrahmat, 2006). Keterisoliran lokasi *Nagari Simanau* merupakan kendala utama bagi perkembangan masyarakat desa. Jalan-jalan darat sudah parah kerusakannya, sehingga penjualan hasil bumipun memerlukan biaya transportasi yang tinggi. Persoalan kerusakan

lingkungan dihadapi pula oleh *nagari* ini, meliputi kerusakan hutan, berkurangnya sumber air, dan degradasi lahan.

Nagari Paninggahan terletak di tepian danau Singkarak, *nagari* ini memiliki aksesibilitas lebih tinggi untuk menjangkau kota dibandingkan dengan *Nagari* Simanau. Wilayahnya memiliki kawasan hutan dan pemerintah setempat bekerjasama dengan UPR *Leasing Co. Ltd* untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dari melalui JIFPro. Bantuan berfokus pada perbaikan ekosistem hutan dengan menanam tanaman produktif, seperti kemiri, coklat dan cengkeh (Harian Umum Haluan, 12 Juni, 2007). *Nagari* ini mempunyai Badan Usaha Milik *Nagari* yakni Yayasan Danau Singkarak, bergerak di bidang sosial dan ekonomi dan merupakan salah satu penggerak perekonomian di *nagari* tersebut.

Peranan perempuan di dua *nagari* tersebut cukup kuat. Meski demikian, terdapat gejala kesenjangan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yaitu akses kedua belah pihak (perempuan dan laki-laki) dalam pemerintahan, layanan publik, dan aktivitas ekonomi masih timpang, hal ini meliputi keterbatasan layanan konsultasi kesehatan dan dukungan permodalan untuk usaha kecil. Aktivitas perempuan terkonsentrasi pada bidang reproduktif, sedangkan kaum laki-laki lebih terfokus di bidang produktif, kemasyarakatan, dan pemerintahan. Pada galibnya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkiprah di berbagai ranah kehidupan. Artinya aspek non-kodrati dapat saling dipertukarkan, untuk itu diperlukan kesepakatan dan komitmen kedua belah pihak sehingga pertukaran peran tidak memunculkan masalah baru.

Provinsi Jawa Barat (Desa Kajian: Nasol dan Gunung Sari, Kabupaten Ciamis). Struktur pemerintahan desa sepenuhnya menerapkan tatanan hierarki PP Nomor 72/2005 tentang desa. Pada dua desa tersebut berkembang organisasi sosial kemasyarakatan berupa Forum Majelis Silaturahmi DKM, tidak ditemui kelembagaan desa adat seperti yang ada di daerah lain.

Pemerintah Desa Nasol memiliki unit usaha PSAB. Akan tetapi, hingga kini petani di Desa Nasol kesulitan mengakses informasi dan inovasi pertanian, minimnya dukungan sarana dan prasarana produksi pertanian, dan kurangnya layanan penyuluhan dari lembaga terkait. Masyarakat berharap komitmen pemerintah akan sektor pertanian ditingkatkan, revitalisasi penyuluhan pertanian dari sisi kelembagaan, pendekatan, dan regenerasi.

Desa Gunungsari memiliki potensi wisata, didukung situasi desa ini yang berada di kaki Gunung Syawal, sayangnya potensi tersebut belum dikembangkan secara optimal. Jika dikemas dan dikelola secara benar, dapat menarik wisatawan untuk berkunjung dan dapat membuka kesempatan kerja bagi warga setempat.

Baik di Desa Nasol maupun Gunung Sari capaian kesetaraan gender di bidang manajemen pemerintahan desa, layanan pendidikan dasar, dan kesehatan masih rendah. Masih ada masyarakat desa yang hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan dan memicu anak-anak untuk putus sekolah. Terdapat sekitar 40% remaja putri putus sekolah, oleh orang tuanya dinikahkan dengan alasan utama untuk mengurangi beban perekonomian rumah tangga.

Provinsi Bali (Desa Kajian: Desa Selanbawak dan Desa Samsam, Kabupaten Tabanan). Desa Selanbawak merupakan tipikal pedesaan (*rural*), mayoritas penduduknya bertani. Desa Samsam mencirikan kondisi transisi desa-kota. Di Bali, istilah desa mengandung dua makna yakni desa adat (pakraman) dan desa dinas. Desa pakraman menangani persoalan adat dan ritual keagamaan Hindu, sedangkan desa dinas berperan dalam administrasi kependudukan (Whitten *et al.*, 1999; Amanah, 2006). Desa pakraman sangat berperan dalam penanaman prinsip Tri Hita Karana (harmonisasi hubungan antara tuhan, manusia, dan alam).

Di Desa Selanbawak terdapat usaha skala rumah tangga pembuatan minyak kelapa oleh kaum perempuan, pembuatan tape singkong, dan ternak babi. Ampas pengolahan minyak kelapa dan kulit singkong sisa untuk membuat tape digunakan untuk campuran

pakan babi. Di Desa Samsam, penduduk bekerja sebagai karyawan, berdagang, dan sebagian lagi bertani dan berkebun. Di Desa Samsam terjadi pergeseran mata pencaharian penduduk dari pertanian ke non-pertanian dan kekosmopolitan masyarakat meningkat.

Selain kelembagaan Desa Pakraman, di dua desa tersebut ada kelembagaan subak, LPD, Posyandu, PKK, Karang taruna, dan Sekehe gong. Kelembagaan subak menunjukkan gejala struktur yang melemah. Terjadi pertarungan antara kepentingan pertanian dengan non pertanian. Laju konversi lahan pertanian meningkat untuk industri dan berdampak pada menurunnya ketersediaan air.

Provinsi Papua (Desa kajian: Desa Sabronsari dan Desa Tablasupa, Kabupaten). Kondisi desa (kampung) di Papua menampilkan penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal dan sedang berproses menuju "keajegan" dilihat dari proses-proses hukum yang terus berkembang. Sejak Januari 2001, Provinsi Papua memperoleh status Otsus melalui UU Nomor 21/2001. Akan tetapi, belum banyak ada penjabaran Otsus menjadi langkah nyata memajukan masyarakatnya.

Sebagaimana istilah desa di Provinsi Bali yang bermakna ganda, maka sebutan kampung di Provinsi Papua pun demikian, yaitu sebagai desa pemerintahan formal dan sebagai lembaga adat. Pemimpin kampung adat disebut *ondoafi* atau di beberapa kampung disebut *ondofolo* dan pemimpin kampung pemerintahan disebut dengan kepala kampung. Ada pula kelembagaan masyarakat yang disebut *keret* yaitu klan yang terdiri atas beberapa rumahtangga atas dasar pertalian darah. Satu keret umumnya terdiri atas beberapa rumahtangga dan membentuk marga.

Kampung Sabronsari, Distrik Sentani Barat menunjukkan kampung yang telah mengalami perkembangan dengan adanya fasilitas jalan raya, listrik dan telepon. Warga Kampung Sabronsari sebagian besar berkebun dengan komoditas utama rambutan dan vanili. Masalah yang dihadapi petani rambutan saat ini adalah gagal panen.

Konsultasi dengan dinas perkebunan maupun penyuluh hampir tidak ada karena ketiadaan penyuluh. Intensitas interaksi antara masyarakat asli Papua di Kampung Sabronsari dengan pendatang dari Jawa dan Sulawesi (Bugis, Buton, dan Makassar) cukup tinggi. Hubungan antara lembaga adat, gereja dan kampung pemerintahan berada dalam posisi setara. Peran lembaga adat di Kampung Sabronsari tidak sekuat di Kampung Tablasupa, ini dikarenakan kondisi masyarakat yang multi-kultur, dan intervensi adat relatif rendah. Hubungan lembaga adat, gereja dan kampung sangat kuat di Kampung Tablasupa. Penguasaan atas lahan sepenuhnya oleh lembaga adat dan jual beli tanah dilarang. Fasilitas penunjang pelaksanaan administrasi pemerintahan di Kampung Sabronsari dan Tablasupa sangat tertinggal. Mestinya, sebagai gerbang Indonesia di Ujung Timur, wilayah ini harus dibangun dengan kokoh, sebagai *benteng* wilayah kesatuan negara Indonesia.

Kesenjangan gender ditemui dalam peran domestik, ekonomi dan sosial antara perempuan dan laki-laki. Meskipun keterwakilan perempuan dalam posisi pemerintahan desa telah ada, namun dukungan sarana kesehatan, pendidikan dan peluang bekerja bagi perempuan masih terbatas. Kaum ibu berkiprah sebagai penjual pinang lengkap dengan pakatnya, yaitu kapur dan buah sirih. Mengunyah pinang merupakan kebiasaan hampir seluruh warga asli Papua. Dengan mengunyah pinang, mereka merasa nyaman untuk bersosialisasi, tanpa kehadirannya, dirasa kurang lengkap. Khusus bidang pendidikan, masih terdapat 15% perempuan di dua kampung tersebut yang tidak bisa membaca tulis. Di bidang kesehatan, fasilitas dan sarana pendukung sulit diakses dari segi ketersediaan sarana, obat-obatan dan ketersediaan tenaga paramedis.

ANALISIS KAJIAN AKSI

Bahasan difokuskan pada alur proses yang telah dilalui selama kajian aksi, yang dibagi menjadi dua bagian. Kedua bagian tersebut

adalah pemahaman kondisi sistem sosial-budaya dan transformasi mutu kehidupan masyarakat desa.

Sistem Sosial - Budaya Masyarakat Desa

Sebagai sebuah studi aksi, pemahaman akan sistem sosial-budaya masyarakat desa kajian merupakan hal yang sangat penting. Bersama-sama, antara tim peneliti dan masyarakat menggali kembali unsur-unsur pokok sistem sosial-budaya masyarakat desa. Di sini tampak perbedaan antara metode penelitian konvensional dengan metode penelitian aksi. Di tipe konvensional, segregasi antara peneliti dengan subyek yang diteliti tampak jelas, sedangkan dalam kaji tindak, antara peneliti dengan masyarakat merupakan suatu tim yang bersama-sama menggarap masalah, mendiskusikan, menentukan prioritas, dan mencari alternatif jalan keluar bersama.

Terdapat dua pendekatan teori untuk membahas sistem sosial masyarakat ini yakni teori fungsional dan teori konflik. Untuk keperluan kajian ini, penulis mendekatinya dengan menggunakan teori fungsional. Hal ini didasarkan adanya fakta bahwa masyarakat memiliki sesuatu yang menjadi pengikat untuk bersatu dan memiliki penghargaan terhadap pemimpin setempat yang menjadi contoh di kalangan mereka. Sistem nilai budaya masyarakat dalam kerangka Kluckhohn berkaitan dengan lima masalah pokok dalam kehidupan manusia yaitu: (1) Hakekat hidup; (2) Hakekat karya manusia; (3) Hakekat kedudukan manusia dalam ruang waktu; (4) Hakekat hubungan manusia dengan alam sekitar dan (5) Hakekat hubungan manusia dengan sesamanya (Koentjaraningrat, 1987). Dengan membanding kelima wilayah lokasi kajian, tampak bahwa masyarakat desa memiliki nilai-nilai luhur terutama dalam menghargai hidup dan kehidupan. Dalam pemanfaatan alam, mereka cenderung bertindak atas dasar kebutuhan bukan karena keserakahan. Ketika kondisi SDA semakin rusak karena tindakan eksploitatif pemilik modal, mereka menggugat. Nilai-nilai yang melandasi budaya masyarakat di desa kajian sangat bervariasi. Di desa kajian di Provinsi NAD dan Sumbar, hal tersebut diwarnai oleh

sistem nilai religi Islam, di Provinsi Bali diwarnai oleh kesepakatan adat dan sistem nilai religi Hindu, dan di Provinsi Papua diwarnai oleh kesepakatan adat dan sistem nilai Kristiani.

Berdasarkan pandangan Sanders (1958) dan Hick (1967) tentang masyarakat, maka dalam tulisan ini masyarakat desa kajian dianalisis dari lima segi seperti ditampilkan pada Tabel 4, yaitu segi: (1) Pola permukiman; (2) Kompetisi penggunaan ruang terutama dalam pemanfaatan SDA dan lingkungan; (3) Kekosmoplotan; (4) Interaksi antar individu; (5) Pembagian kerja, kekuasaan dan tanggungjawab. Hasil kajian memperlihatkan bahwa sistem sosial masyarakat di lokasi kajian menunjukkan adanya gejala monoton, artinya dinamika masyarakat desa cenderung stagnan. Menurunnya kondisi fisik lingkungan hampir terjadi di seluruh wilayah kajian. Karenanya, dalam kajian aksi upaya peningkatan mutu kehidupan secara berkelanjutan diintegrasikan dengan diterapkannya prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan.

Transformasi Mutu Kehidupan Masyarakat Desa

Telah banyak kajian tentang desa beserta dinamika masyarakatnya, sehingga perspektif yang ada dalam wacana teori dan praktek sangatlah beragam. Dalam hal ini, penulis mendukung tesis berikut: "masyarakat desa memiliki tata nilai tersendiri, tentang lingkungan dan relasi gender, yang berbeda dengan tata nilai dunia luar, dan bahwa perubahan tata nilai, pola pikir, dan pola tindak hanya akan terjadi jika sesuai dengan tata nilai yang mereka miliki". Hal ini sejalan dengan pandangan Chambers (1991), Korten (1989), Pretty (1995), dan Mikkelsen (1999) tentang pentingnya mengutamakan kebutuhan manusia dalam pembangunan. Pembangunan berkelanjutan UNCED pada tahun 1992 dimaknai sebagai berikut: "pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka". Keberlanjutan tentunya tidak sebatas pada upaya konservasi, namun berkaitan pula dengan struktur sosial yang

mantap, interaksi sosial yang harmonis dan bergulirnya kegiatan ekonomi produktif. Untuk mendukung kehidupan, manusia senantiasa berkarya dan berkreasi menciptakan teknologi yang tepat dengan kondisi setempat.

Dalam pandangan *ecofeminism*, dengan pengemukanya Susan Griffin, Rosemary Radford Reuther, Vandana Shiva, bumi merupakan representatif dari ibu. Bumi yang dieksploitasi besar-besaran oleh sistem penguasaan modal dan pembangunan yang timpang telah berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat desa. Jika dibandingkan dengan kondisi di wilayah studi, ternyata kaum perempuan menanggung beban yang sangat berat akibat kerusakan sumberdaya hutan, air, dan tanah. Mereka bekerja lebih keras untuk memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari, dan lahan pun menjadi kering dan sulit ditanami. UU Nomor 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa "setiap manusia mempunyai hak yang sama terhadap lingkungan yang baik dan sehat" dan "setiap manusia berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan serta mencegah, dan menanggulangi pencemaran kerusakan lingkungan hidup". Dengan demikian, sudah seharusnya ada kepedulian berbagai pihak untuk menyokong kelangsungan SDA yang berkelanjutan baik secara sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknologi yang tepat guna.

Sebagaimana dikemukakan, tahap awal kajian adalah observasi dan penggalangan informasi tentang situasi desa, yang hasilnya telah dikemukakan pada sub bab terdahulu. Tahap selanjutnya, diidentifikasi potensi dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat desa dengan mengintegrasikan perspektif gender. Untuk membantu mengatasi kesenjangan kompetensi masyarakat, dilakukan pelatihan berdasarkan kebutuhan dengan materi meliputi tata kelola pemerintahan desa, pengarusutamaan gender dalam merancang kebijakan dan implementasinya, pengembangan kelompok usaha bersama, dan pengembangan jaringan kerja sama. Peserta pelatihan adalah perangkat pemerintah, wakil kelompok perempuan, anggota badan perwakilan desa, badan pemberdayaan masyarakat desa, karang taruna, dan tokoh masyarakat. Beragam

teknik digunakan meliputi simulasi, diskusi, kunjungan lapang, dan praktek. Antusiasme peserta sangat tinggi, terlebih pelatihan ditindaklanjuti dengan pendampingan oleh tenaga pendamping setempat. Profesi pendamping pun beragam, ada yang guru, penyuluh, dan pegiat lembaga swadaya masyarakat. Setiap desa didampingi oleh satu orang pendamping, yang bertugas memfasilitasi pengembangan usaha kelompok dan pengembangan jaringan kerja sama multi-pihak.

Hasil pelatihan menunjukkan bahwa pemahaman gender hampir di seluruh lokasi kajian, masih rendah. Ada indikasi masih terbatasnya pengembangan wawasan tentang keadilan dan kesetaraan gender. Perbandingan kondisi akses, peluang, manfaat, dan kontrol masyarakat desa (laki-laki dan perempuan) dalam beberapa dimensi pembangunan desa disajikan pada Tabel 13.4.

Tabel 13.4. Keadilan dan Kesetaraan Gender pada Beberapa Segi Kehidupan

Indikator	Provinsi				
	NAD	Sumbar	Jabar	Bali	Papua
KKG dalam mengakses sumberdaya (alam, modal, pendidikan, kesehatan)	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah
KKG dalam tata kelola pemerintahan desa	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah
KKG dalam pengawasan akan pelaksanaan program pembangunan di desa	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah
KKG dalam merasakan manfaat dari pembangunan di desa	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah

Keterangan: KKG = Keadilan dan Kesetaraan Gender

Sumber: Data primer tahun 2006 diolah

Tabel 13.5. Sistem Sosial Masyarakat Desa Kajian di Lima Provinsi

Peubah	Indikator	Wilayah Kajian				
		NAD	SUMBAR	JABAR	Bali	Papua
1. Pola Permukiman	Tersebar/berpencar	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	Mengelompok	Ya, disebut gompang	Ya, disebut jorong	Ya, disebut dusun	Ya, disebut Banjar	Ya, disebut distrik
	Tata aturan	Ada (religi)	Ada (adat)	Ada (formal)	Ada, berdasarkan religi	Ada (genealogis)
2. Penggunaan ruang/kom-petisi pemanfaatan SDAL	Pengaturan oleh desa	Secang	Secang	Secang	Bogus, kesepakatan antar desa pakraman dan juga antar desa dinas	Secang, dengan kesepakatan antara gereja-kampung-oncobi
	Relasi gender	Timpong masih ada subordinasi peran laki-perempuan	Setora	Relatif setora, meski ada ketimpangan dalam penguasaan	Agak timpong (pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan oleh kaum pria)	Timpong (perempuan masih subordinasi di berbagai bidang)

Peubah	Indikator	Wilayah Kajian				
		NAD	SUMBAR	JABAR	Bali	Papua
				eset		
3. Kekosmopolitan	Interaksi dengan dunia luar	Rendah	Tinggi	Secang	Sangat tinggi	Sangat terbatas
	Fasilitas dan infrastruktur komunikasi	Ada	Terbatas	Ada	Ada	Sangat terbatas
4. Interaksi antar warga	Media pertemuan rutin warga	Melalui mesnabah	Melalui kerapatan anak nagari dan musyawarah nitik mamak	Rapat desa	Melalui sangkepan	Rapat kampung
	Perkembangan kelompok usaha	Secang cirintis	Sudah ada	Secang cirintis	Sudah berkembang, usaha baru, bata, usaha rafe, dan ternak babi	Secang cirintis
5. Pembagian kerja, kekuasaan	Efektifitas kepemimpinan	Secang	Secang	Kurang berjalan	Secang	Secang

Peubah dan tanggung jawab	Indikator	Wilayah Kajian				
		NAD	SUMBAR	JABAR	Bali	Papua
	Pendelegasian tugas	Sedang	Terbatas	Sedang	Bagus	Sedang
	Upaya meningkatkan mutu kehidupan	Melalui usaha tani terpadu	Pengelolaan hutan berbasis masyarakat	Optimasi potensi wisata dan usaha air minum	Usaha pembuatan <i>Virgin Coconut Oil</i> dan sirap	Peternakan

Bisa dikatakan kesenjangan gender masih tinggi dalam proses pembangunan. Wajah desa yang miskin, kerusakan SDA yang semakin meningkat, dan kondisi kesehatan keluarga yang memprihatinkan tercermin pada kondisi perempuan di berbagai bidang di pedesaan. Sebagaimana diungkap oleh Pretty (1995), dan Oxall dan Baden (1997), bahwa meskipun laki-laki dan perempuan terlibat dalam pengelolaan usaha, namun perempuan masih dihadapkan pada situasi kerja yang tidak aman dan tidak nyaman, beban berlebih, rendah diri, dan hilangnya penghargaan sosial.

Beberapa faktor terkait dengan keberhasilan upaya mengembangkan mutu kehidupan masyarakat desa meliputi: (1) Anggaran untuk pengembangan kapasitas SDM masyarakat sangat minim. Euforia otonomi daerah telah berkontribusi pada perilaku sebagian Pemda untuk berkonsentrasi pada program yang secara langsung mendongkrak PAD; (2) Keterbatasan mutu dan jumlah tenaga pendamping baik penyuluh, sukarelawan, dan pegiat LSM. (3) Lemahnya jejaring kerjasama dengan pihak luar desa, sehingga mempersulit hasil-hasil usaha desa bisa didistribusikan/dipasarkan ke luar desa dan (4) Budaya patriarki dan kesenjangan gender dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan desa.

UPAYA PENGEMBANGAN MUTU KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA SECARA BERKELANJUTAN DAN BERPERSPEKTIF GENDER

Desa memiliki SDA dan lingkungan yang harus dikelola dengan baik untuk mencegah masalah sosio-ekonomi dan lingkungan. Permasalahan kekurangan pangan, menurunnya daya dukung lingkungan, terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, peluang usaha, dan teknologi yang adaptif terhadap kondisi ekstrim, dihadapi pula oleh sejumlah 42.000 desa dari sejumlah 66.000 desa (non-kelurahan). Akan halnya provinsi studi, dengan membanding angka-angka yang tersaji pada Tabel 13.6 tampak bahwa IPM meningkat dari tahun 2002 sampai 2005. Berdasarkan data IPG tersebut, Provinsi Sumbar memiliki nilai Indeks IPG paling

tinggi. Namun, dalam GEM tampak angka tertinggi dicapai oleh Provinsi NAD. Hal ini sejalan dengan program pemberdayaan perempuan di NAD yang lebih intensif dibandingkan daerah lainnya, terutama pasca bencana tsunami.

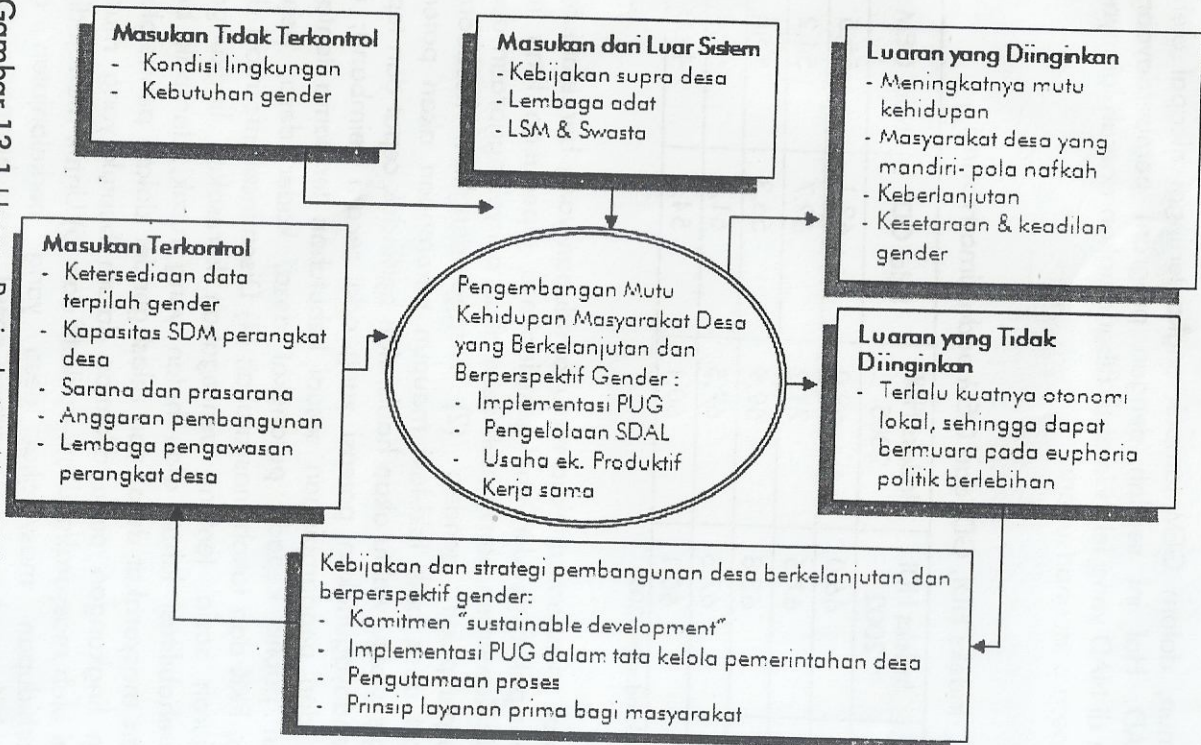
Tabel 13.6. Indeks HDI, GDI dan GEM pada Lima Provinsi

Provinsi	Indeks HDI 2002	Indeks HDI 2005	Nilai GDI	Nilai GEM
NAD	66,0	69,0	62,1	55,5
SUMBAR	67,5	71,2	69,7	54,2
Jabar	65,8	69,9	56,3	43,6
Bali	67,5	67,5	61,2	42,3
Papua	60,1	60,1	54,3	49,0

Sumber: Statistik Indonesia 2006

Upaya untuk mengembangkan mutu kehidupan yang berkelanjutan dan berperspektif gender, maka setidaknya diperlukan lima hal berikut: (1) Komitmen pemerintah desa akan penyelenggaraan desa yang berperspektif gender; (2) Mengembangkan kesadaran masyarakat desa baik laki-laki maupun perempuan akan potensi SDA yang sewaktu-waktu akan habis, dan bertindak cepat dan tepat untuk mendayagunakan potensi yang ada secara seimbang; (3) Pelatihan dan pendampingan sesuai kebutuhan terutama tentang pelayanan publik kepada perangkat desa, kader desa, pegiat Posyandu, PKK dan tokoh masyarakat; (4) Diseminasi informasi dan pembelajaran sosial tentang pencegahan kerusakan lingkungan, cara merehabilitasi lahan atau hutan yang rusak, dampak bagi kehidupan masyarakat desa, dan relasi gender dalam pengelolaan SDA dan lingkungan perlu dikemas dalam bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat desa, aplikatif dan (5) Untuk mewujudkan mutu kehidupan masyarakat desa yang berkelanjutan dan berperspektif gender melalui sistem sosial yang harmonis, tentu memerlukan masukan (*input*), melalui tahap proses, dan menghasilkan luaran (*output*).

Gambar 13.1. Upaya Peningkatan Mutu Kehidupan Masyarakat Desa



Kehidupan masyarakat desa merupakan sistem yang terkait satu dengan lainnya, sehingga sebagaimana disajikan pada Gambar 13.1, ada faktor-faktor yang dapat dikendalikan, dan ada yang tidak. Di sisi lain, setiap tindakan yang dilakukan, memiliki dampak, bisa positif, bisa pula negatif.

KESIMPULAN

1. Masyarakat desa memiliki keunikan yang khas antara satu dengan yang lainnya, dan belum semua elemen masyarakat memahami akan konsep keberlanjutan dan aspek gender dalam kehidupan. Nilai-nilai keagamaan dan adat sangat melekat pada masyarakat desa di lokasi kajian yakni di Provinsi NAD, Sumbar, Bali, dan Papua. Untuk Jawa Barat, kondisinya sudah sangat umum, sebagaimana banyak dijumpai di banyak desa-desa di daerah lain di Indonesia. Relasi gender dalam pengelolaan lingkungan masih timpang, terutama dalam pengawasan dan manfaat yang adil.
2. Faktor-faktor pendukung perwujudan mutu kehidupan masyarakat desa berkelanjutan dan berperspektif gender adalah dimilikinya komitmen pemerintah akan kebijakan dan strategi pengarusutamaan gender, komitmen akan *sustainable development*, penguatan kelembagaan masyarakat pedesaan, pengembangan usaha bersama, dan pengembangan jejaring kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dan swasta.
3. Manusia dan lingkungan memiliki relasi yang kuat karenanya upaya pengembangan mutu kehidupan perlu menjamin hak-hak perempuan dan laki-laki secara adil.

REFERENSI

- Alfitri. 2006. "Nagari dan Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan Desa Berbasis Kemitraan." Makalah Seminar Studi Aksi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan Desa Berbasis Kemitraan, diselenggarakan

oleh Partnership for Governance Reform in Indonesia dan PSP3 IPB. Padang 23 Maret 2006.

- Amanah, S. 2006. Pengembangan Komunikasi Administrasi Efektif dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Tanggap Gender. Working Paper No 2. Bogor: Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, IPB
- _____, 2007. Kearifan Lokal dalam Pengembangan Masyarakat Pesisir. CV. Citra Praya: Bandung
- Bawden, R. 1991. Toward Action Research Systems. In Ortrun Zuber-Skerritt (Editors) Action Research for Change and Development. Aldershot: Avebury.
- Badan Pusat Statistik. 2006. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia menurut Daerah, 1996-2005. Berita Resmi Statistik No. 47/IX/1 September 2006. Badan Pusat Statistik: Jakarta
- Breman, J. dan Wiradi, G. 2004. Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa. Studi Kasus Dinamika Sosio-Ekonomi di Dua Desa Menjelang Akhir Abad Ke-20. Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta
- Hicks, Herbert J. 1967. The Management of Organizations. McGraw-Hill Book Company: New York
- Nurrochmat, D. R., 2006. Politik Desentralisasi Pemerintahan Desa. Working Paper Studi Aksi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan Desa Berbasis Kemitraan.PSP3 IPB dan Partnership for Governance Reform in Indonesia UNDP.
- Oxaal dan Baden. 1996. Employment and Sustainable Livelihoods: A Gender Perspective. Report No. 37. Sussex, UK: BRIDGE (development – gender).
- Kasryno, F. dan Suryana, A. 1996. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan. dalam M.T.F. Sitorus, A. Supriono, T. Sumarti, dan Gunardi (Editor). Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia, Prof. Dr. Sajogjo 70 Tahun. PT. Grasindo: Jakarta.
- Pretty, J. N., 1995. Regenerating Agriculture: Policies and Practice for Sustainability and Self-Reliance. London: Earthscan Publication Ltd.
- Sanders, Irwin T. 1958. The Community: An Introduction to a Social System.: The Ronald Press Company: New York.

Whitten, Tony, Roehayat E. Soeriaatmadja, dan Suraya A. Afiff. 1999. "Ekologi Jawa dan Bali (The Ecology of Jawa and Bali)." Seri Ekologi Indonesia Jilid II. Alih bahasa Kartika Sari, Tyas Budi Utami, dan Agus Widyantoro. Dalhousie University: Canada.

